Nusron Pertanyakan Rencana Bappebti Bikin Bursa Bitcoin Cs

Tanggal	: Selasa , 29 Juni 2021
Media	: Detik.com
Halaman	: -
Wartawan	: Achmad Dwi Afriyadi
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Nusron Wahid *(Anggota Komisi VI DPR RI)*, Indrasari Wisnu Wardhana, *(Kepala Bappebti)*
Rubrik	: Fintech
Topik	: Kripto

Nusron Pertanyakan Rencana Bappebti Bikin Bursa Bitcoin Cs

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance

Selasa, 29 Jun 2021 15:44 WIB

0 komentar SHARE



Foto: Tim Infografis, Andhika Akbarayansyah

Jakarta - Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid menyambut baik rencana Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) akan mengatur perdagangan aset kripto. Karena selain kapitalisasinya besar, juga supaya perdagangannya tidak liar dan ada kejelasan perlindungan terhadap konsumen dan investor.

Namun Nusron Wahid tidak setuju kalau untuk mengatur perdagangan ini harus dengan mendirikan bursa tersendiri yang bernama digital future exchange (DFX).

Menurut Nusron, tren di dunia itu ada integrasi market. Di Indonesia sudah ada tiga bursa, yaitu bursa efek Indonesia (BEI), dulunya ada dua bursa efek yaitu bursa efek jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) kemudian merger menjadi BEI.

Bursa komoditas juga ada dua, yaitu Bursa Berjangka Jakarta dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX).

"Saya kira kalau kemudian khusus untuk Kripto dibuatkan bursa DFX tersendiri berlebihan dan perlu dipertanyakan kredibilitasnya," kata Nusron dalam RDP dengan Bappebti, Selasa (29/6/2021).

> **Baca juga:**
> **Wow! Transaksi Kripto Dalam 5 Bulan di RI Tembus Rp 370 Triliun**

Nusron mengungkapkan beberapa alasan kenapa rencana tersebut ia pertanyakan. Pertama, bagaimana mungkin bursa didirikan hanya untuk satu komoditas. Berbeda dengan BBJ dan ICDX yang diperdagangkan multi komoditas. Kedua, dari aspek filosofi dan regulasi masih tarik menarik antar stakeholder.

"Teman-teman BEI dan OJK Pasar Modal menganggap karena ini definisinya aset kripto berarti ini masuk kategori modal bukan komoditas, sehingga harus di bawah pengaturan Bursa Efek bukan bursa komoditi atau bursa tersendiri. Pada satu sisi lain, crypto currency karena namanya digunakan sebagai alat pembayaran BI juga merasa itu harus diatur oleh bank sentral," terang Nusron.

Lanjut ke halaman berikutnya

Lebih lanjut, politikus Partai Golkar ini mengungkapkan, aset kripto ini ini sewaktu-waktu bisa dicabut dan dilarang peredarannya.

"Kalau dibuat bursa baru, apakah membuat bursa untuk memperdagangkan hal yang belum jelas?" Tanyanya.

Alasan ketiga, lanjut mantan Ketua Umum GP Ansor ini, masalah kredibilitas penyelenggara bursa baru juga belum teruji, karena ini mengumpulkan dana besar dari masyarakat.

Jangan sampai kejadian seperti perdagangan emas yang pernah kabur, atau yang terjadi di Turki. Di mana kripto diperdagangan sendiri di Bursa Aset Kripto Thodex yang membawa kabur duitnya, sehingga bursanya kolaps dan uang masyarakat hilang.

"Akibatnya masyarakat yang dirugikan. Mendingan kita optimalkan bursa yang sudah ada, ditambahi unit digital kripto," tegas Nusron.

Sementara itu, Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana mengungkapkan, sesuai dengan UU No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Kripto tidak cocok dan tidak sesuai kalau diperdagangkan di dalam bursa efek. Sebab tidak masuk kategori efek.

> **Baca juga:**
> **DPR Soroti Tawaran Investasi Emas dan Forex Ilegal**

"Dalam UU Mata Uang jelas, bahwa yang sah dan boleh untuk alat bayar di Indonesia adalah rupiah. Jadi yang paling pas menurut UU ini masuk kategori komoditas. Hanya soal nama aset kripto karena berdasarkan kesepakatan beberapa negara, untuk membedakan dengan currency atau alat bayar," terangnya.

Wisnu mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang membahas dan mengkaji apakah akan membuat bursa baru atau mengoptimalkan bursa yang sudah ada.

"Nanti kita akan bahas dan putuskan pada saat yang tepat," ungkapnya.

(acd/eds)